

LAPORAN DELEGASI BKSAP DPR-RI



Sidang IPU ke-150

5-9 April 2025 Tashkent, Uzbeksitan



Inter-Parliamentary Union

150 IPU ASSEMBLY

Tashkent, Uzbekistan 5-9 April 2025

I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inter-Parliamentary Union (IPU) merupakan organisasi parlemen global yang beranggotakan 180 parlemen negara. Forum tertinggi IPU adalah IPU General Assembly atau Sidang Umum IPU. IPU Assembly ini merupakan sebuah ajang dari organisasi atau badan pembuat keputusan yang mewadahi parlemen. Pada saat ini, IPU adalah satu-satunya organisasi yang mewakili sisi legislatif yang berskala global. Sidang IPU ke-150 mengangkat tema “*Parliamentary action for social development and justice*”, dan diselenggarakan di Tashkent, Uzbekistan, Gedung *Tashkent City Congress Centre* pada tanggal 5-9 April 2025.

Kehadiran dan partisipasi DPR RI dalam Sidang IPU ke-150 ini juga merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang yang mengatur terkait diplomasi parlemen, termasuk Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau biasa disebut UU MD3, yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang diantara lainnya untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menegaskan bahwa tiga fungsi DPR RI, yaitu pengawasan, penganggaran, legislasi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai Alat Kelengkapan DPR RI diberi mandat untuk menjalankan diplomasi parlemen. Sesuai dengan Pasal 116 UU MD3 dan Pasal 82 Tata Tertib DPRRI Tahun 2020, tugas BKSAP antara lain: membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen.

BKSAP merupakan *focal point* diplomasi parlemen DPR RI dalam berbagai forum internasional termasuk Sidang Umum IPU. BKSAP DPR RI telah secara rutin mengirimkan delegasi di Sidang Umum IPU yang diselenggarakan dua kali dalam satu tahun. Pada Sidang Umum IPU ke-148 kali ini, DPR RI selalu berprinsip untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan menjalankan misi untuk turut serta membahas berbagai tantangan dunia termasuk perdamaian seperti mandat UUD

1945. Selain itu, keikutsertaan DPR RI dalam sidang tersebut juga bagian dari upaya untuk memelihara hubungan bilateral dan multilateral dengan parlemen Anggota IPU dan berbagai organisasi internasional yang hadir.



Gambar 1.0 Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri sidang IPU ke-150 yang bertempat di Gedung Tashkent City Congress Centre, Tashkent, Uzbekistan

B. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi DPR RI pada Sidang IPU ke-150 ini berdasarkan :

1. Surat Tugas Nomor 09/KU.05.01/KSOI/03/2025 tentang Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri 150th Inter-Parliamentary Union Assembly.

C. SUSUNAN DELEGASI

Adapun susunan dan komposisi Delegasi DPR RI ke Sidang IPU ke-150 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Fraksi/ Nomor Anggota	Jabatan / Posisi
1.	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.	F-PKS/A-422	Ketua Bksap Dpr Ri /Ketua Delegasi
2.	Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, Mcomm&Mediast	F-PDIP/A-258	Wakil Ketua Bksap /Anggota Delegasi
3.	Ravindra Airlangga, B.A., M.S.	F-P.Golkar/A-300	Wakil Ketua Bksap /Anggota Delegasi
4.	Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A.	F-P.Gerindra/A-105	Wakil Ketua Bksap /Anggota Delegasi
5.	Bramantyo Suwondo, M.M.Ir	F-P.Demokrat/A-557	Wakil Ketua Bksap /Anggota Delegasi
6.	Diah Pikatan O. Putri Hapranie	F-PDIP/A-198	Anggota Bksap /Anggota Delegasi
7.	Trinovi Khairani, B.A.	F-P.Golkar/A-271	Anggota Bksap /Anggota Delegasi
8.	Melly Goeslaw	F.P.Gerindra/A-91	Anggota Bksap /Anggota Delegasi
9.	Andina Thresia Narang, B.Com	F-P.Nasdem/A-415	Anggota Bksap /Anggota Delegasi
10.	Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si.	F-PKB/A-66	Anggota Bksap /Anggota Delegasi
11.	Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc.,M.A.	F-PKS/A-477	Anggota Bksap /Anggota Delegasi
12.	Verrell Bramasta	F-PAN/A-507	Anggota Bksap /Anggota Delegasi
13.	H. Fathi	F-P.Demokrat/A-548	Anggota Bksap /Anggota Delegasi

Selama persidangan berlangsung, Delegasi DPR RI didampingi oleh jajaran Staff khusus, Pejabat, Staff Setjen DPR RI dan Tenaga Ahli BKSAP.

D. MAKSDU DAN TUJUAN PENGIRIMAN DELEGASI

1. Maksud

Maksud dari pengiriman Delegasi DPR RI mengikuti Sidang IPU ke-150 adalah:

- a. Memperkuat persahabatan dan meningkatkan kerja sama baik secara multilateral maupun bilateral dengan negara-negara anggota IPU beserta organisasi internasional yang hadir di Sidang IPU;
- b. Memperjuangkan berbagai isu internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional sehingga menghasilkan resolusi-resolusi yang implementatif dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan dunia.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari pengiriman Delegasi DPR RI ke Sidang IPU ke-150 adalah:

- a. Berpartisipasi aktif dalam Sidang Umum IPU ke-150 sesuai mandat diplomasi parlemen;
- b. Penguatan peran diplomasi parlemen Indonesia di forum parlemen dunia;
- c. Mengembangkan strategi bersama dengan delegasi parlemen yang hadir untuk implementasikan resolusi-resolusi yang telah diadopsi, dan memecahkan tantangan yang dihadapi bersama.
- d. Memperkenalkan kemitraan IPU dengan pimpinan dan anggota BKSAF periode 2024-2029

E. MISI DELEGASI

Delegasi DPR RI ke Sidang IPU ke-150 mengemban misi untuk :

1. Memperjuangkan Agenda Darurat (*Emergency Item*) sebagai upaya diplomasi untuk menghentikan perang di Gaza melalui resolusi berjudul *The need for urgent action on the recent violation of the ceasefire agreement by Israel in Palestine, the escalating conflicts in the Democratic Republic of Congo and Sudan, and the compounding effects of global warming* dan krisis kemanusiaan pasca gempa di Myanmar melalui resolusi *Parliamentary diplomacy to promote peace and address the humanitarian crisis in Myanmar*.
2. Mempromosikan agenda *19th Parliamentary Union of OIC member states (PUIC) Assembly and other related meeting* yang akan dilaksanakan pada tanggal 12-15 Mei 2025 di Jakarta.



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.



F. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Serangkaian kegiatan dilakukan pada masa persiapan partisipasi Delegasi DPR RI pada Sidang IPU ke-150, baik persiapan teknis maupun persiapan substansi. Guna kelancaran tugas Delegasi dari segi teknis, Sekretariat BKSAP menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung bagi keikutsertaan Delegasi selama sidang berlangsung. Sementara dari segi substansi, Sekretariat bersama Staff Khusus dan Tenaga Ahli telah menyusun rancangan resolusi dan posisi delegasi.



Gambar 1.1 Ketua BKSAP DPR RI, Dr.Mardani Ali Sera dalam sidang IPU150 di Tashkent, Uzbekistan



Gambar 1.2 Anggota dan Pimpinan BKSAP DPR RI, Fathi, Dr. Mardani Ali Sera, Diah Pikatan O. Haprani, Irine Yusiana Roba Putri, Melly Goeslaw, Bramantyo Suwondo pada sidang IPU150 di Tashkent, Uzbekistan.



II ISI LAPORAN

A. AGENDA SIDANG

Berikut adalah agenda Sidang Umum IPU ke-150 bagi delegasi DPR RI yang mengambil tema “*Parliamentary action for social development and justice*” yang diselenggarakan di Taskent City Congress Centre, Tashkent, Uzbekistan, tanggal 5-9 April 2025:

Saturday, 5 April 2025	Venue
09.00 – 09.30 ASEAN+3 Meeting	Multifunctional Hall 4
09.30 – 11.00 Asia Pacific Group Meeting	Multifunctional Hall 4
11.30 – 13.00 APA Coordinating Meeting	Hilton Hotel Ballroom
13.30 – 15.30 Consultation Meeting of the PUIC Group	Multifunctional Hall 4
10.00 - 13.00 Forum of Women Parliamentarians	Multifunctional Hall 4
14.30 - 17.30 Inaugural Ceremony	Plenary Hall, Senate of Uzbekistan

Sunday, 6 April 2025	Venue
09.00 - 11.00 Governing Council	Multifunctional Hall 1 & 2
09.00 – 13.00 Standing Committee on Peace and International Security: • Debate on the draft resolution: <i>The Role of Parliaments in advancing two-State solution in Palestine</i> • Beginning of drafting in plenary	Multifunctional Hall 3
09.30 – 13.00 Standing Committee on Sustainable Development: • Debate on the draft resolution on Parliamentary strategies to mitigate the long-lasting impact of conflicts, including armed conflicts, on sustainable development • Beginning of drafting in plenary	Multifunctional Hall 4
11.00 – 13.00 Assembly: Start of the General Debate Parliamentary action for social development and justice	Multifunctional Hall 1 & 2
14.30 - 17.30 Forum of Young Parliamentarians	Multifunctional Hall 4
14.30 – 18.30 Standing Committee on Peace and International Security: • Drafting in plenary of the draft resolution	Multifunctional Hall 3
14.30 – 18.30 Assembly: • Continuation of the General Debate	Multifunctional Hall 1 & 2
14.30 – 15.00 Bilateral Meeting with Armenia	Room 1
15.15 – 15.45 Bilateral Meeting with Myanmar	Room 1

18.30 The 4th Conference of the Non-Aligned Movement Parliamentary Network	Hilton Hotel Ballroom
--	-----------------------

Monday, 7 April 2025	Venue
09.00 – 13.00 Assembly: Continuation of the General Debate	Multifunctional Hall 1 & 2
09:00 – 13:00 Standing Committee on Peace and International Security - Completion of drafting in plenary of the draft resolution	Multifunctional Hall 3
11:00 – 13:00 Standing Committee on United Nations Affairs - Discussion on The UN field presence in support of national development: The case of Uzbekistan	Multifunctional Hall 4
14.00 – 14.30 Bilateral Meeting with Turkey	Room 3
14.30 – 15.00 Bilateral Meeting with Sweden	
15.00 – 15.30 Bilateral Meeting with Ukraine	
14:30 – 17:30 Standing Committee on Democracy and Human Rights - Preparatory debate on the next resolution of the Standing Committee: Recognizing and supporting the victims of illegal international adoption and taking measures to prevent this practice - Follow-up on implementation of the 2023 resolution on Orphanage trafficking: The role of parliaments in reducing harm	Multifunctional Hall 4
14:30 – 18:30 Standing Committee on Sustainable Development - Drafting in plenary of the draft resolution	Multifunctional Hall 3
14.30 – 18.30 Assembly - Continuation of the General Debate - Vote on the Emergency Item	Multifunctional Hall 1 & 2

Tuesday, 8 April 2025	Venue
09.00 – 11.00 Standing Committee on United Nations Affairs - Discussion on the growing role of the BRICS in international relations: What impact for the UN?	Multifunctional Hall 3

09.00 – 13.00 Assembly - Debate on the Emergency Item - Continuation of the General Debate	Multifunctional Hall 1 & 2
09.30 – 12.30 Standing Committee on Democracy and Human Rights - Follow-up on implementation of the 2024 resolution on the impact of artificial intelligence on democracy, human rights and the rule of law - Elections	Multifunctional Hall 4
14:00 – 16:00 Standing Committee on Peace and International Security - Adoption of the draft resolution on the role of parliaments in advancing a two-State solution in Palestine - Preparations for future Assemblies - Elections	Multifunctional Hall 3
14:30 – 15:00 Forum of Women Parliamentarians (elections to the Bureau of Women Parliamentarians)	Multifunctional Hall 4
14.30 – 18.00 Assembly - Special accountability segment on the implementation of IPU resolutions and other decisions - Conclusion of the General Debate	Multifunctional Hall 1 & 2
16:30 – 17:30 Forum of Women Parliamentarians	Multifunctional Hall 4
17:00 – 18:30 Standing Committee on Sustainable Development - Adoption of the draft resolution on Parliamentary strategies to mitigate the long-lasting impact of conflicts, including armed conflicts, on sustainable development - Preparations for future Assemblies - Elections	Multifunctional Hall 3

Wednesday, 9 April 2025	Venue
09.00 – 13.00 Governing Council	Multifunctional Hall 1 & 2

<ul style="list-style-type: none"> - Decisions on the human rights of MPs, - Reports on the activities of Committees and other bodies - Reports of specialized meetings 	
<p>closing Assembly: Adoption of resolutions Reports of the Standing Committees Outcome document of the General Debate Adoption of amendments to the Statutes and Rules Closing sitting</p>	Multifunctional Hall 1 & 2

Sidang IPU ke-150 juga mempunyai agenda utama pembahasan yaitu:

1.	Election of the President of the 150th Assembly
2.	Consideration of requests for the inclusion of an emergency item in the Assembly agenda
3.	General Debate on the theme <i>Parliamentary action for social development and justice</i>
4.	Special accountability segment on the implementation of IPU resolutions and other decisions
5.	<i>The role of parliaments in advancing a two-State solution in Palestine</i> (Standing Committee on Peace and International Security)
6.	<i>Parliamentary strategies to mitigate the long-lasting impact of conflicts, including armed conflicts, on sustainable development</i> (Standing Committee on Sustainable Development)
7.	Reports of the Standing Committees
8.	Approval of the subject items for the Standing Committee on Peace and International Security and for the Standing Committee on Sustainable Development for the 152nd Assembly and appointment of the co-Rapporteurs
9.	Amendments to the IPU Statutes and Rules

B. PARTISIPASI DELEGASI DALAM SIDANG

Sidang IPU ke-150 yang mengambil tema “*Parliamentary action for social development and justice*”, diselenggarakan di Tashkent, Uzbekistan pada tanggal 5-9 April 2025. Delegasi DPR RI menghadiri dan berperan aktif dalam berbagai sesi-sesi persidangan sebagai berikut:

1. ASEAN+3 & ASIA PACIFIC GROUP (APG) MEETING

Presiden Senat Pro Tempore dari Filipina, Jinggoy Ejercito Estrada, memimpin pertemuan ASEAN+3 pada hari Sabtu, 5 April 2025, dalam Sidang Majelis ke-150 IPU yang diselenggarakan di Tashkent, Uzbekistan. Pertemuan ini berfungsi sebagai platform dialog dan kerja sama antar parlemen negara-negara anggota ASEAN dan ketiga mitra dialog mereka—Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan—untuk mendorong kolaborasi regional, mengatasi tantangan bersama, dan memajukan pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Dalam pertemuan tersebut, Estrada meminta dukungan bagi upaya Filipina untuk mendapatkan kursi tidak tetap di Dewan Keamanan PBB periode 2027-2028, dengan tujuan mewakili Asia Tenggara dan negara-negara yang lebih kecil dalam isu-isu keamanan dan kerja sama global.

Pada pertemuan ini Delegasi Indonesia mencalonkan sejumlah nama pimpinan dan anggota BKSAP untuk menduduki posisi-posisi strategis di IPU. Nama-nama dan posisi yang dinominasikan adalah:

- Bapak Dr. Mardani Ali Sera - Ketua BKSAP dari Fraksi PKS sebagai anggota Komite Eksekutif menggantikan Bapak Fadli Zon yang sudah bukan anggota DPR RI;
- Bapak Bramantyo Suwondo – Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi Demokrat sebagai anggota Komite urusan PBB;
- Bapak Ravindra Airlangga – Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi Golkar sebagai anggota Komite Pembangunan Berkelanjutan menggantikan Bapak Putu Supadma Rudana yang sudah bukan anggota DPR RI;
- Bapak Hussein Fadluloh – Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi Gerindra sebagai anggota Board of Forum of Young Parliamentarians;
- Bapak Jazuli Juwaini – Anggota BKSAP dari Fraksi PKS sebagai anggota Komite Timur Tengah.

Pertemuan juga membahas rencana pengajuan emergency item mengenai Myanmar dengan judul ‘Parliamentary diplomacy to promote peace and address the humanitarian crisis in Myanmar’. Usulan ini inisiasi oleh Parlemen Filipina bersama-sama dengan Parlemen Thailand, Laos dan Malaysia. Usulan mengenai

emergency item terkait Myanmar tersebut kemudian juga didukung oleh delegasi Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi PDI-P, Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas situasi kemanusiaan yang memburuk terutama dengan adanya bencana alam gempa bumi. Irine Yusiana Roba Putri mendesak Junta Militer Myanmar untuk segera menghentikan kekerasan terhadap warga sipil dan menyerukan dukungan terhadap usulan Filipina untuk mengedepankan emergency item terkait Myanmar.

Sementara itu, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera juga menyampaikan bahwa selain persoalan Myanmar, parlemen negara-negara ASEAN juga hendaknya mendukung emergency item mengenai Palestina. Kedua isu, baik Palestina dan Myanmar sama-sama merupakan isu kemanusiaan yang harus didukung, terutama dengan adanya fakta bahwa permasalahan tersebut telah menelan jumlah korban Masyarakat sipil yang tidak sedikit. Setelah mendapatkan dukungan dari semua Parlemen negara-negara ASEAN, usulan emenrgency item mengenai Myanmar dan Palestina akan kembali dibahas pada pertemuan grup geopolitik Asia Pasifik untuk dimintakan dukungan dari parlemen dari negara-negara di Kawasan tersebut.



Gambar 2.1 Pimpinan BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, Ravindra Airlangga, M. Husein Fadlulloh, dan Bramantyo Suwondo pada pertemuan Grup Geopolitik ASEAN+3 dan Asia Pacific Group pada sidang IPU 150 di Tashkent, Uzbekistan.

2. FORUM OF WOMEN PARLIAMENTARIANS

Sesi ke-39 Forum Anggota Parlemen Perempuan diadakan pada tanggal 5 dan 8 April 2025. Sesi ini mempertemukan 401 peserta, termasuk 131 anggota parlemen (104 perempuan dan 27 laki-laki) dari 66 negara, bersama dengan perwakilan dari berbagai organisasi internasional. Presiden Biro Anggota Parlemen Perempuan, Ms. C. López Castro (Meksiko), membuka sesi tersebut. Forum memilih Ms. T. Narbaeva, Ketua Senat Uzbekistan dan Presiden Majelis IPU ke-150, sebagai Presiden sesi ke-39.

Pada penyampaian aktivitas untuk memajukan kesetaraan gender, Ms. V. Riottot (Prancis) merangkum kegiatan sesi ke-52 Biro Anggota Parlemen Perempuan, yang diadakan di Jenewa pada bulan Oktober 2024, dan sesi ke-53, yang diadakan tepat sebelum pertemuan Forum. Ia memaparkan studi IPU terbaru tentang seksisme, pelecehan, dan kekerasan terhadap perempuan di parlemen di kawasan Asia-Pasifik, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Commonwealth Parliamentary Association dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly. Ms. S. Mikayilova (Azerbaijan) melaporkan tentang pekerjaan Gender Partnership Group, termasuk pemantauan partisipasi perempuan dan keseimbangan gender dalam delegasi ke Majelis ke-150. Para peserta diberi pengarahan tentang kegiatan IPU terkini dan mendatang untuk memajukan kesetaraan gender. Ibu López Castro melaporkan laporan IPU tentang Perempuan di parlemen dan peta Perempuan dalam politik. Ia juga menyoroti Konferensi Global Anggota Parlemen Perempuan yang diadakan di Meksiko, yang menghasilkan rencana aksi bagi parlemen untuk memajukan paritas.

Sebagai kontribusi terhadap resolusi yang dibahas oleh Sidang Umum, para peserta mengkaji, dari perspektif gender, rancangan resolusi di hadapan Standing Committee on Peace and International Security, berjudul “The role of parliaments in advancing a two-State solution in Palestine”, dan rancangan resolusi di hadapan Standing Committee on Sustainable Development, yang berjudul “Parliamentary strategies to mitigate the long-lasting impact of conflicts, including armed conflicts, on sustainable development”. Perdebatan dilakukan dalam dua kelompok diskusi, yang masing-masing membahas salah satu rancangan resolusi.

Delegasi Indonesia menyampaikan dalam forum ini bahwa dalam tiga tahun sejak perang di Ukraina, lebih dari 30% dari total korban tewas atau 3.905 perempuan dan 291 anak perempuan terbunuh. Dalam 16 bulan, pasukan Israel telah membunuh 48.570 warga Palestina di Gaza dan mengungsi 1,9 juta orang, dan hampir 70% orang yang terbunuh di Gaza adalah perempuan dan anak-anak. Yang menyedihkan, angka-angka ini kemungkinan jauh lebih tinggi. Namun,

perempuan dan anak perempuan bukan hanya angka yang ditampilkan sebagai data statistik. Perempuan ini juga ibu, saudara perempuan, anak perempuan, pencari nafkah keluarga, pemimpin masyarakat, dan masih banyak lagi. Mereka kehilangan suami, anak, saudara kandung, dan orang tua. Perempuan ini kehilangan segalanya.

Terkait pembahasan Rancangan Resolusi tentang “Strategi parlemen untuk mengurangi dampak konflik yang berlangsung lama, termasuk konflik bersenjata, terhadap pembangunan berkelanjutan”, Indonesia mendukung rancangan resolusi ini dan usulan amandemen terkait perspektif dan partisipasi perempuan dalam membangun ketahanan pascaperang. Perempuan mengalami dampak perang yang tidak proporsional, selama dan setelah perang.

Delegasi Indonesia menegaskan keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam proses pemulihan dan perdamaian awal sangat penting untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan. Di banyak negara, perempuan memimpin pemulihan ekonomi negara, memberikan bantuan kemanusiaan, dan menyatukan masyarakat mereka. Perempuan adalah kunci dalam mencapai SDGs.

Forum ini juga menyatakan dukungannya terhadap amandemen terkait kesetaraan gender yang diusulkan oleh para delegasi. Sebagian besar amandemen yang diusulkan dan didukung dimasukkan ke dalam teks rancangan resolusi, yang memperkuat perspektif gender dalam teks tersebut. Forum ini juga menyerukan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di tingkat masyarakat, melibatkan mereka dalam upaya perdamaian, rekonstruksi, dan peringatan dini, serta mengatasi kebutuhan mereka yang paling mendesak dalam hal pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap keuangan.



Gambar 2.2 Wakil Ketua dan Anggota BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri dan Melly Goeslaw mewakili delegasi DPR RI dalam pertemuan Forum of Women Parliamentarians di sidang IPU ke-150

3. STANDING COMMITTEE ON PEACE AND INTERNATIONAL SECURITY

Komite Tetap Perdamaian dan Keamanan Internasional (Standing Committee on Peace and International Security), mengadakan tiga kali sidang dari tanggal 6 hingga 8 April 2025, dengan pimpinan Mrs. A. Kuspan (Kazakhstan). Komite ini ditugaskan untuk membahas rancangan resolusi “The role of parliaments in advancing a two-State solution in Palestine.” Rancangan resolusi dan nota penjelasan yang menyertainya telah disusun oleh tim yang terdiri dari enam Co-Rapporteur yaitu: Mr. M.A. Bouchouit (Aljazair), Mrs. T. Vardanyan (Armenia), Mr. J. Buttimer (Irlandia), Mrs. T. Ts’ita-Mosena (Lesotho), Mrs. M. Guerra Castillo (Meksiko), dan Mr. T. Utikere (Selandia Baru). Sedangkan delegasi Indonesia yang hadir adalah Anggota BKSAP Fathi dari Fraksi Partai Demokrat, Andina Theresia Narang dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, Trinovi Khairani dari Fraksi Partai Golkar serta Jazuli Juwaini dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Setelah presentasi rancangan resolusi oleh tiga dari enam Co-Rapporteur, 29 perwakilan dari tiap-tiap delegasi yang hadir menyampaikan pandangan mereka mengenai resolusi tersebut, termasuk Indonesia yang disampaikan oleh Anggota BKSAP Bapak Fathi dari Fraksi Partai Demokrat, serta Anggota BKSAP Bapak Jazuli Juwaini dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Fathi menyampaikan bahwa sangatlah penting bagi Parlemen anggota IPU untuk terus memperjuangkan solusi dua negara, dan rancangan resolusi yang menekankan pembentukan dua negara merupakan salah satu cara untuk menunjukkan dukungan dan mendorong perdamaian dan stabilitas dalam konflik Israel-Palestina, serta solusi yang adil dan berjangka panjang berdasarkan hukum internasional dan pengakuan bersama.

Gambar 2.3 Anggota BKSAP DPR RI, Fathi dalam sesi pertemuan Standing Committee on Peace and International Security di sidang IPU ke-150. Beliau menekankan pentingnya memperjuangkan resolusi dua negara dalam penyelasaian konflik di Gaza.



Terlebih, dengan adanya kejadian luar biasa yang dilakukan oleh pasukan Israel terhadap ribuan warga sipil, yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Oleh kerena itu, sudah saatnya bagi para anggota parlemen, untuk segera mengambil sikap dan mendorong satu-satunya pilihan yang layak terhadap permasalahan konflik Israel-Palestina, yaitu solusi dua negara yang hidup berdampingan dalam damai.

Delegasi RI yang dalam hal ini diwakilkan oleh BKSAP DPR RI sangat mendukung solusi dua negara di mana Israel dan Palestina hidup damai dalam batas-batas wilayah tahun 1967. Indonesia percaya bahwa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan bernegara, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Indonesia telah dan akan secara konsisten memperjuangkan diakhirnya pendudukan Israel atas wilayah Palestina dan mendorong aksi internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Untuk itu, DPR RI mendukung penuh rancangan resolusi ini untuk diadopsi dalam Sidang Majelis Umum IPU ke-150.



Gambar 2.4 Anggota BKSAP DPR RI sekaligus Komite Timur Tengah, Dr. Jazuli Juwaini pada sesi pertemuan Standing Committee on Peace and International Security di sidang IPU ke-150

Setelah melalui perdebatan yang sengit dan Panjang, utamanya diantara delegasi negara-negara Arab dan Timur Tengah dengan delegasi dari negara-negara Eropa mengenai susbtansi daripada rancangan resolusi “The role of parliaments in advancing a two-State solution in Palestine”, voting kemudian dilaksanakan untuk mendapatkan persetujuan terhadap tiap pasal yang ada di rancangan resolusi. Hasil voting menunjukkan bahwa masukan substansi dari negara-negara Arab dan Timur-Tengah tampil sebagai yang paling banyak dipilih. Terhadap perkembangan tersebut, delegasi Israel memutuskan untuk walk out dengan terlebih dulu menyampaikan ketidak puasan mereka terhadap forum dan menganggap mayoritas negara-negara yang mendukung Solusi dua negara (termasuk Indonesia), berpihak pada teroris dan anti demokrasi.

Menyikapi dinamika tersebut, beberapa negara Eropa menyampaikan pandangannya bahwa rancangan resolusi yang memuat mayoritas masukan dari negara-negara Arab, Timur-Tengah dan Asia yang mendukung Solusi dua negara tidak dapat diterima karena menawarkan sudut pandangan yang tidak berimbang. Mereka kemudian beranggapan bahwa rancangan resolusi tersebut tidak dapat diadopsi. Kemudian pada sidang terakhir, pada sore hari tanggal 8 April 2025, Komite menganggap rancangan resolusi yang telah direvisi tidak seimbang dan oleh karena itu tidak dapat diadopsi dalam bentuknya yang sekarang oleh Majelis. Terhadap hal tersebut Sekretariat IPU menawarkan untuk menunda pembahasan rancangan resolusi ke Sidang Umum berikutnya. Tawaran tersebut kemudian ditolak oleh mayoritas delegasi termasuk Indonesia.

Anggota BKSAP Bapak Jazuli Juwaini dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pandangan bahwa tidak mungkin menunda pembahasan rancangan resolusi karena hal tersebut sama saja dengan bersikap abai terhadap penderitaan rakyat Palestina yang telah menjadi korban kekejaman tentara Israel. Politisi senior dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu kemudian meminta agar Komite segera mengesahkan rancangan resolusi yang telah melalui proses perdebatan dan voting. Menanggapi banyaknya perbedaan pandangan terhadap rancangan resolusi versi terbaru tersebut, Delegasi Palestina mengusulkan agar semua amandemen dibatalkan dan rancangan resolusi awal yang diusulkan oleh Co-Rapporteur (sebelum banyak masukan) diadopsi.



Gambar 2.5 Delegasi DPR RI dalam perumusan resolusi “The role of parliaments in advancing a two-State solution in Palestine”



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

Sidang kemudian di skors untuk memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok Geopolitik untuk melakukan lobi dan konsultasi. Setelah itu kemudian disepakati untuk kembali ke rancangan resolusi awal. Pada tanggal 9 April 2025, Presiden Komite menyampaikan rancangan resolusi pada sidang pleno Majelis (Assembly), dan rancangan tersebut diadopsi secara konsensus. Namun demikian, terdapat sejumlah catatan seperti Delegasi Austria menyatakan keberatan atas penggunaan istilah "penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan" dalam paragraf pembukaan 8, dan "tahanan politik" dalam paragraf pembukaan 9 dan paragraf operasional 1. Sedangkan Delegasi Jerman, Hongaria, dan Swiss menyatakan keberatan atas keseluruhan teks resolusi. Di sisi lain, Delegasi Republik Islam Iran juga menyatakan penolakannya terhadap keseluruhan teks resolusi tersebut, dikarenakan adanya pandangan bahwa hanya ada satu Solusi bagi konflik Israel-Palestina, yaitu negara Palestina Merdeka tanpa adanya negara Israel. Sedangkan Delegasi Palestina menyambut baik pengesahan resolusi tersebut tetapi menyerukan tindakan yang lebih tegas, termasuk sanksi dan akuntabilitas, di masa mendatang.



Gambar 2.6 Dr. Jazuli Juwaini menuntut komite Peace and International Security untuk segera membahas rancangan resolusi yang diajukan

4. STANDING COMMITTEE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Standing Committee on Sustainable Development mengadakan sidang pada tanggal 6, 7, dan 8 April 2025 dengan Ketua, Mr. W. William (Seychelles). Komite ini diberi tugas untuk menyusun resolusi berjudul “Parliamentary strategies to mitigate the long-lasting impact of conflicts, including armed conflicts, on sustainable development”. Rancangan resolusi dan nota penjelasan yang menyertainya telah disiapkan oleh co-Rapporteurs, yakni Ms. H. Fayez (Bahrain), Ms. E.T. Muteka (Namibia), dan Mr. R. Fogiel (Polandia).

Penyusunan resolusi dilakukan dalam sidang pleno. Komite telah menerima 241 amandemen yang diajukan oleh 29 Parlemen Anggota. Rancangan resolusi yang dikonsolidasikan diadopsi secara aklamasi. India menyampaikan keberatan pada paragraf operasional 18. Republik Islam Iran menyampaikan keberatan pada paragraf pembukaan 2, 10, dan 21, serta paragraf operasional 21, dengan menyebutkan kekhawatiran bahwa resolusi tersebut mengabaikan akar penyebab konflik, seperti sistem global yang tidak adil, intervensi asing, dan tindakan pemaksaan sepihak, serta tidak menyebutkan hak fundamental untuk pembangunan. Federasi Rusia tidak lagi mengacu pada paragraf pembukaan 13, dengan menyebutkan posisinya sebagai pemegang veto Dewan Keamanan PBB; dari paragraf pembukaan 20, dengan menyebutkan suaranya yang menentang adopsi Pakta untuk Masa Depan oleh Majelis Umum PBB; dan dari paragraf operasional 21 dan 26, dengan menegaskan kembali penolakannya terhadap sanksi sepihak yang tidak diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB. Selain itu, Rusia juga menyampaikan kekhawatirannya pada paragraf operasional 14, dengan menyatakan bahwa konsep “ekosida” tidak memiliki definisi yang jelas.



Gambar 2.7 Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga dalam pertemuan komite Sustainable Development yang membahas resolusi berjudul *“Parliamentary strategies to mitigate the long-lasting impact of conflicts, including armed conflicts, on sustainable development.”*

Delegasi Indonesia menyampaikan bahwa dampak konflik kekerasan terhadap kemajuan SDGs tetap parah, meskipun ada upaya internasional untuk memberikan bantuan dan rekonstruksi pascakonflik. Oleh karena itu, menilai dampak konflik bersenjata secara sistematis di wilayah-wilayah ini sangat penting bagi negara-negara yang terkena dampak konflik untuk mengatasi tantangan pembangunan.

Penghancuran infrastruktur penting—sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan sistem energi—melemahkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, dan mendorong peluang ekonomi. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa \$50 miliar akan diperlukan untuk membangun kembali Gaza dan menyiratkan bahwa dibutuhkan waktu 350 tahun hanya untuk memulihkan PDB Gaza ke levelnya pada tahun 2022.

Parlemen memiliki peran penting untuk memastikan pelaksanaan program rekonstruksi yang memprioritaskan pencegahan dan penyelesaian konflik, berinvestasi dalam pembangunan perdamaian, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat lokal, khususnya perempuan dan pemuda dalam pemulihan pascakonflik.

Delegasi Indonesia juga mengajukan amandemen terhadap isi dari resolusi, yang kemudian disetujui oleh mayoritas delegasi yang hadir. Adapun amandemen yang diajukan adalah “Calls for strengthening the existing of a global commission, such as UN Mediation Unit which is comprising strategic experts, with a mandate to work towards a ceasefire in countries affected by conflicts, and to ensure the continuation of sustainable development in conflict-affected areas, with a focus on addressing the root causes of such conflicts and developing innovative mediation approaches”.

Selanjutnya, Komite juga menyetujui rencana kerja untuk Majelis berikutnya. Rencana tersebut mencakup debat tentang topik resolusi berikutnya, debat panel tentang Dampak pemanasan global: Seruan parlemen untuk melindungi yang paling rentan, dan segmen untuk mempersiapkan Pertemuan Parlemen pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Brasil (COP30).

Pada pertemuan ini, Komite juga mendukung pencalonan anggota Biro sebagaimana diusulkan oleh kelompok geopolitik. Berikut adalah anggota terpilih dari masing-masing kelompok geopolitik:

Kelompok Geopolitik	Negara	Nama Anggota Parlemen
African Group	Chad	Ms. F. Mahamat Sed
	Eswatini	Ms. L.P. Ngwenya
Arab Group	Qatar	Mr. Y. Al-Khater
	United Arab Emirates	Ms. M. Al Suwaidi
Asia-Pacific Group	Indonesia	Mr. R. Airlangga
	Nepal	Ms. A. Shakya
	Philippines	Ms. M. Arenas
Eurasia Group	Belarus	Mr. S. Rachkov
Group of Latin America and the Caribbean	Brazil	Ms. L. Carneiro
	Mexico	Mr. C. Rendón
	Paraguay	Mr. N. Castellano
Twelve Plus Group	Lithuania	Ms. R. Miliute
	Monaco	Mr. F. Notari



Gambar 2.8 Wakil Ketua BKSAP, Ravindra Airlangga, resmi menjadi anggota dari komite Pembangunan Berkelanjutan IPU yang mewakili Grup Geopolitik Asia-Pasifik

5. FORUM OF YOUNG PARLIAMENTARIANS

Forum of Young Parliamentarians diselenggarakan pada 6 April 2025. Forum ini mempertemukan lebih dari 100 peserta, termasuk 47 anggota parlemen (17 perempuan muda dan 30 laki-laki muda) dari 42 negara, serta perwakilan dari parlemen pemuda dan organisasi mitra. Pertemuan ini dipimpin oleh Bapak D. Carden (Inggris), Presiden Biro Anggota Parlemen Muda.

Para anggota parlemen muda yang hadir memberikan informasi terkini kepada Forum tentang perkembangan terbaru dalam mempromosikan partisipasi pemuda di negara mereka. Sorotan yang ditonjolkan antara lain peluncuran baru kampanye "I Say Yes to Youth in Parliament!", dan kemajuan dalam keterlibatan dengan parlemen, komite, dan dewan pemuda. Mencermati tantangan yang dihadapi pemuda di beberapa negara akibat konflik, dan penindasan suara pemuda, para anggota parlemen muda berkomitmen kembali untuk mempertahankan momentum positif dalam menegakkan dan lebih lanjut mempromosikan hak-hak politik pemuda dan perempuan.



Gambar 2.9 Anggota BKSAP, Diah Pikatan O. Putri, atau yang akrab disapa Pinka, mewakili Indonesia pada pertemuan Forum of Young Parliamentarians di sidang IPU ke-150.

Delegasi Indonesia, Diah Pikatan Orissa Putri, menyampaikan, pentingnya partisipasi pemuda dalam politik di forum internasional. Dengan 60% populasi Indonesia berada di usia produktif, kita harus memberi ruang lebih besar bagi anak muda untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Indonesia juga mengapresiasi peran IPU dan inisiatif global seperti Open Government Partnership (OGP) yang mendorong keterlibatan pemuda dalam pemerintahan terbuka dan transparan. Semua parlemen di dunia perlu memastikan suara

mereka didengar dan partisipasi mereka bermakna demi masa depan demokrasi yang inklusif.

Terkait dengan persiapan Sidang Umum IPU ke-151, Forum menunjuk Mr. K. Ait Mik (Maroko) untuk menyusun laporan tinjauan pemuda mengenai resolusi yang diusulkan, yaitu Mengakui dan Mendukung Korban Adopsi Internasional Ilegal dan Mengambil Langkah-Langkah untuk Mencegah Praktik Ini. Para anggota parlemen muda menekankan pentingnya menyeimbangkan dua prioritas: menangani pelanggaran dan meminta pertanggungjawaban pelaku, sekaligus mempertimbangkan stigma negatif yang mungkin timbul bagi para korban. Pendekatan yang cermat direkomendasikan, dengan penekanan pada mendengarkan para korban untuk memastikan suara dan keprihatinan mereka didengar.

Gambar 2.10 Pada pertemuan Forum of Young Parliamentarians di sidang IPU ke-150, Pinka menyampaikan pentingnya partisipasi pemuda dalam politik di forum internasional. Dengan 60% populasi Indonesia berada di usia produktif, anak muda harus diberikan ruang lebih besar untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.



6. GENERAL DEBATE OF THE ASSEMBLY

Sidang Pleno Majelis (Assembly) dihadiri oleh 129 Parlemen anggota IPU, 2 Parlemen pemantau (observer) yaitu Barbados dan Dominica, serta Associate Member dan juga anggota-anggota pemantau lainnya yang terdiri dari organisasi-organisasi internasional. Pada tanggal 7 April, Sekretariat IPU telah menerima total empat (4) Rancangan Emergency Item yang akan dibahas lebih lanjut di Sidang Pleno. Keempat Rancangan Emergency Item tersebut adalah sebagai berikut:

1. Advancing global economic cooperation: Reducing tariffs and combating protectionism (diajukan oleh Chile dan Peru)

2. Parliamentary diplomacy to promote peace and address the humanitarian crisis in Myanmar (diajukan oleh Philippines dan Thailand)
3. The need for urgent action on the recent violation of the ceasefire agreement by Israel in Palestine, the escalating conflicts in the Democratic Republic of Congo and Sudan, and the compounding effects of global warming (diajukan oleh Seychelles, Zimbabwe, Jordan dan Mesir, dengan dukungan dari Grup Geopolitik Arab dan Grup Geopolitik Afrika)
4. Ending the double standard: Calling on the international community to accept refugees from Gaza instead of exploiting them to attack Israel (diajukan oleh Israel)

Rancangan resolusi ketiga merupakan hasil penggabungan dan kompromi antara Grup Geopolitik Arab dan Afrika. Semula masing-masing Grup bermaksud untuk mengajukan rancangan emergency item sendiri-sendiri. Namun, karena pertimbangan taktis agar mendapatkan lebih banyak dukungan saat voting, maka kedua Grup sepakat untuk meleburkan rancangan resolusi masing-masing menjadi satu resolusi saja.

Pada saat Pertemuan Grup Geopolitik ASEAN+3 dan Asia Pacific Group Delegasi Indonesia sebetulnya telah menyatakan secara terbuka akan mendukung resolusi Emergency Item mengenai Myanmar yang diajukan oleh Philippines. Namun, pada saat Sidang Pleno, Delegasi Indonesia memutuskan untuk mengalihkan dukungan dari usulan emergency item 2, menjadi sepenuhnya mendukung usulan emergency item 3, dengan harapan bahwa isu Palestina akan berhasil diakomodir di IPU tidak hanya pada resolusi hasil sidang Komite Tetap Perdamaian dan Keamanan Internasional saja, tetapi juga dalam resolusi Emergency Item.

Sebelum memasuki sesi voting untuk memutuskan usulan emergency item mana yang akan dipilih oleh Sidang Pleno, Presiden IPU terlebih dulu menjelaskan kronologis terkait keempat usulan emergency item. Presiden menginformasikan kepada Majelis bahwa, sesuai dengan tata tertib, Steering Committee (SC) telah bertemu dua kali, pada tanggal 6 dan 7 April, untuk memberikan pendapat mengenai keabsahan usulan sesuai dengan Peraturan 11.2 Majelis, yang menyatakan bahwa permintaan untuk memasukkan emergency item harus berkaitan dengan situasi penting terkini yang menjadi perhatian internasional. SC juga telah sepakat pada tanggal 6 April bahwa ketika itu hanya proposal 1 yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Aturan 11.2, dan menyarankan agar proposal 2 dan 3 direvisi. Pada saat itu, proposal 4 belum lengkap. Pada tanggal 7 April, SC kemudian bertemu

kembali dan menyetujui bahwa versi revisi proposal 2 memenuhi kriteria. Namun, telah diungkapkan pandangan bahwa cakupan versi revisi proposal 3 masih sangat luas, meliputi empat topik berbeda yang dilebur jadi satu. Proposal 4 kini telah lengkap, tetapi SC mengamati bahwa bahasa yang digunakan tidak selaras dengan pedoman IPU tentang bahasa kasar.

Sekretaris Jenderal membacakan judul dan sponsor keempat proposal dan mengkonfirmasi bahwa proposal tersebut telah diajukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Tata Tertib Majelis. Presiden kemudian menjelaskan bahwa, untuk memungkinkan Majelis mengkaji isu-isu mendesak yang lebih luas, dan atas usulan Komite Eksekutif, telah dibuat ketentuan bagi Majelis ke-150 untuk membahas dan mengadopsi resolusi mengenai usulan emergency item kedua, dengan syarat usulan yang berada di posisi kedua memperoleh mayoritas suara dua pertiga yang dipersyaratkan.

Delegasi dari Belgia, Belanda, dan Zimbabwe berbicara menentang pendekatan eksperimental ini terhadap emergency item kedua. Mereka menyatakan bahwa Statuta saat ini mengatur pencantuman hanya satu emergency item pada agenda Majelis dan bahwa setiap amandemen pada Statuta IPU memerlukan mayoritas dua pertiga sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Statuta.

Seorang delegasi dari Irak mengajukan poin ketertiban pada proposal 4. Ia mempertanyakan penerimaan proposal tersebut, karena menurut pandangannya, isinya menganjurkan pelanggaran hukum internasional. Presiden mengklarifikasi bahwa, sesuai dengan Aturan 12 Majelis, Komite Pengarah menyatakan pendapat tentang penerimaan tetapi tidak membuat keputusan, seraya menambahkan bahwa keputusan akhir dibuat melalui pemungutan suara Parlemen Anggota IPU.



Gambar 2.11 Pada sidang IPU ke-150, Indonesia mendukung proposal resolusi Emergency Item berjudul "*The need for urgent action on the recent violation of the ceasefire agreement by Israel in Palestine, the escalating conflicts in the Democratic Republic of Congo and Sudan, and the compounding effects of global warming.*"

Seorang delegasi dari Nigeria mempertanyakan penerimaan proposal 3, yang menurut pandangannya mencakup tiga subjek berbeda dan karena itu tidak sejalan dengan isi dan semangat Aturan 11.2c Majelis. Setelah mendengar pendapat para delegasi, Presiden menyatakan bahwa, jika Majelis merasa tidak nyaman dengan gagasan bereksperimen dengan barang darurat kedua, eksperimen tersebut dapat ditinggalkan. Dengan demikian, prosedur pengajuan emergency item akan dijalankan seperti sediakala.

Sekretaris Jenderal menegaskan bahwa saat ini belum ada usulan resmi yang diajukan untuk mengubah Statuta dan Peraturan guna memungkinkan dimasukkannya item darurat kedua. Presiden kemudian menegaskan bahwa Majelis ke-150 hanya akan memiliki satu item darurat, dan mengundang para sponsor untuk menyampaikan proposal mereka. Sidang Pleno kemudian mendengarkan paparan usulan Emergency Item 1 dan 2 dan tidak ada yang menyampaikan keberatan atau penentangan terhadap kedua proposal tersebut. Namun demikian, Delegasi Israel menyatakan pandanganya pada Usulan Emergency Item 3 yang menurutnya memiliki satu tujuan yaitu untuk menjelek-jelekkan Israel. Setelah menyampaikan paparan usulan Emergency Item ke 4, delegasi Israel kemudian memustuskan untuk menarik kembali usulan tersebut, sehingga total hanya ada 3 usulan Emergency Item yang akan di-voting oleh Sidang Pleno.

Hasil voting tidak ada satupun usulan yang mencapai dua pertiga mayoritas dukungan. Presiden kemudian mengumumkan bahwa tidak satu pun dari tiga usulan yang masih ada di atas meja telah memperoleh mayoritas dua pertiga yang dipersyaratkan. Presiden memberitahukan kepada Majelis bahwa hasil ini berarti tidak satu pun dari mereka dapat dimasukkan dalam agenda Majelis ke-150 sesuai dengan Aturan 11.2a Majelis. Dengan demikian **Sidang Pleno IPU ke-150 tidak menghasilkan Emergency Item apapun.**

Hasil voting yang tercatat sebagai berikut:

Resolusi	Parlemen pengusung	In favor (+)	Against (-)	abstain	2/3 total votes +-	Hasil*
<i>Advancing global economic cooperation: Reducing tariffs and combating protectionism</i>	Chile dan Peru	482	460	255	628 (dari total +- 942)	482 (tidak lolos)
<i>Parliamentary diplomacy to promote peace and address the humanitarian crisis in Myanmar</i>	Filipina dan Thailand	630	358	209	659 (dari total +- 988)	630 (tidak lolos)

<i>The need for urgent action on the recent violation of the ceasefire agreement by Israel in Palestine, the escalating conflicts in the Democratic Republic of Congo and Sudan, and the compounding effects of global warming</i>	Seychelles, Zimbabwe, Yordania dan Mesir dengan dukungan Arab Group dan African Group	584	393	220	651 (dari total +- 977)	584 (tidak lolos)
--	---	-----	-----	-----	-------------------------	-------------------

*Untuk dapat menjadi resolusi suara yes (voting +) harus lebih besar dari dari total voting yes (+) dan no (-).

Di sisi lain, Sidang Pleno (Assembly) mengakomodasi kepentingan DPR RI yang menominasikan sejumlah nama (pimpinan dan anggota BKSAP) untuk duduk di berbagai posisi strategis yang ada di IPU. Komposisi pimpinan dan anggota BKSAP yang telah diakomodasi di IPU Adalah sebagai berikut:

- Dr. Mardani Ali Sera – Ketua BKSAP akan menjadi anggota Executive Committee mewakili Grup Asia Pasifik menggantikan Fadli Zon hingga Oktober 2027.
- Jazuli Juwaini – Anggota BKSAP akan menjadi anggota Committee on Middle East Questions hingga Maret 2029.
- Ravindra Airlangga – Wakil Ketua BKSAP akan menjadi anggota Committee on Sustainable Development mewakili Grup Geopolitik Asia Pasifik
- Bramantyo Suwondo – Wakil Ketua BKSAP akan menjadi anggota Committee on United Nations Affairs mewakili Grup Geopolitik Asia Pasifik

7. STANDING COMMITTEE ON UNITED NATIONS AFFAIRS

Komite Tetap Urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Standing Committee on United Nations Affairs) bersidang pada tanggal 7 dan 8 April 2025. Sidang dibagi menjadi dua sesi, Dimana sesi pertama lebih bersifat diskusi dan sharing of best practices peran PBB pada Pembangunan di Uzbekistan. Sesi ini menampilkan pembicara Mrs. S. Machl (Koordinator Residen PBB, Uzbekistan), yang menjelaskan mengenai kehadiran lapangan PBB di Uzbekistan khususnya bagaimana tim PBB tersebut mengkoordinir entitas-entitas yang bekerja untuk mengimplementasikan Kerangka Kerja Sama yang dirancang oleh PBB dengan koordinasi erat bersama Pemerintah, serta mendapatkan masukan dari Senat Uzbekistan dan organisasi masyarakat sipil yang ada di negara tersebut.

Sesi pertama juga membahas mengenai pendanaan pekerjaan pembangunan PBB yang masih terlalu bergantung pada alokasi dana dari donor. Hal tersebut

berarti, bahwa badan-badan PBB memiliki sedikit fleksibilitas untuk menanggapi kebutuhan yang terus berkembang di lapangan. Sesi pertama ini juga menekankan pada peran parlemen dalam mengawasi perancangan program-program negara PBB, serta dalam mengadvokasi pendanaan berkualitas tinggi untuk program-program tersebut dengan kementerian terkait dan organisasi multilateral, termasuk Bank Dunia dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Sesi kedua Komite berfokus pada meningkatnya peran BRICS dalam hubungan internasional, dengan presentasi dari Bapak C. Cajado Sampaio (Brasil) dan Bapak O. Malginov (Duta Besar Federasi Rusia untuk Uzbekistan). Diskusi ini melanjutkan sesi Komite pada Oktober 2024, yang berfokus pada peran G20. Sesi ini menyoroti mengenai persamaan dan perbedaan antara G20 dengan BRICS, serta bagaimana relasi keduanya dengan PBB.

BRICS sendiri dimulai pada tahun 2009 sebagai kemitraan informal antara Brazil, Russia, India, China dan Afrika Selatan yang berupaya memperkuat kerja sama politik dan ekonomi mereka dalam kerangka multilateral PBB. Tujuan utamanya adalah untuk membantu negara-negara anggota memanfaatkan ekonomi global demi kepentingan rakyatnya. Pada sesi ini, Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Bapak Hussein Fadlulloh Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi Partai Gerindra menyampaikan intervensi yang menggarisbawahi mengenai Indonesia sebagai anggota baru BRICS, serta bagaimana organisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya.

Menurut Bapak Hussein Fadlulloh, meskipun G20 dan BRICS sama-sama beroperasi di bidang ekonomi, BRICS lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang dalam konteks tatanan dunia multipolar. Sebagai forum alternatif bagi aspirasi negara-negara berkembang yang agendanya sangat terkait dengan agenda PBB, termasuk agenda reformasi. BRICS berpotensi memperkuat multilateralisme dengan mengadvokasi reformasi tata kelola global, mendorong kerja sama ekonomi, dan mendorong tatanan internasional yang lebih adil dan setara yang mewakili kepentingan negara-negara ekonomi berkembang dan negara-negara berkembang.



Gambar 2.12 Wakil Ketua BKSAP, M. Husein Fadlulloh, menyampaikan intervensi yang menggarisbawahi mengenai Indonesia sebagai anggota baru BRICS, serta bagaimana organisasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya

Dari segi manfaat, DPR RI berpandangan bahwa BRICS menyediakan pendanaan alternatif untuk infrastruktur penting dan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan di negara-negara anggota, termasuk transisi energi. BRICS juga menyediakan peluang kolaborasi di industri pertanian, dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Hal ini penting bagi Indonesia karena saat ini pemerintah Indonesia sedang memprioritaskan pencapaian swasembada pangan nasional sekaligus berkontribusi pada inisiatif penanggulangan kelaparan global. Sedangkan dari segi ekonomi, BRICS menyediakan diversifikasi pasar dan peluang besar untuk kemitraan strategis dengan para anggotanya, termasuk Brasil di bidang pertanian, India di bidang teknologi, dan Tiongkok di bidang manufaktur. Kolaborasi ini akan memungkinkan transfer teknologi dan inovasi, yang akan meningkatkan daya saing produk nasional.

Gambar 2.13
Wakil Ketua
BKSAP DPR RI,
Bramantyo
Suwondo,
terpilih sebagai
anggota Komite
UN Affair
mewakili Grup
Geopolitik Asia-
Pacific



Tidak lolosnya resolusi tentang situasi Gaza menambah catatan tidak bulatnya IPU untuk isu mendesak yang telah menyita perhatian dunia tersebut. Patut pula menjadi catatan adalah soliditas negara-negara yang tergabung dalam grup geopolitik seperti Afrika, yang menjadi pengusung resolusi diwakili Afrika Selatan, maupun grup geopolitik Asia. Beberapa parlemen Afrika memberikan suara yang tidak senada dengan usulan Afrika Selatan. Hal ini juga terlihat di Grup Asia, seperti Parlemen dari India, Kanada, bahkan Australia. Kanada dan Australia tercatat juga berada di grup lain yakni *Twelve+*.

8. STANDING COMMITTEE ON DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

Standing Committee on Democracy and Human Rights mengadakan dua kali sidang. Pada sidang pertamanya, yang diadakan pada tanggal 7 April 2025 dengan Presiden Ms. D. O'Neill (Australia) sebagai ketua, Komite membahas resolusi berikutnya, yaitu “Recognizing and supporting the victims of illegal international adoption and taking measures to prevent this practice”, yang akan dibahas pada Sidang IPU ke-151 nanti. Dua co-Rapporteurs persidangan ini adalah Mr. M. De Maegd (Belgia) dan Mt. S. Patra (India). Perdebatan dibuka dengan kesaksian yang menyentuh dari Ms. C. Fanon, seorang korban adopsi internasional ilegal. Sebanyak 28 delegasi berkontribusi pada perdebatan tersebut.

Setelah perdebatan ini, Ms. L. Reynolds (Australia) membuka diskusi tentang tindak lanjut resolusi IPU 2023 Perdagangan anak yatim: Peran parlemen dalam mengurangi kerugian. Pada sidang kedua, yang diadakan pada tanggal 8 April 2025 dengan Ibu O'Neill sebagai ketua, Komite mengadakan debat mengenai tindak lanjut resolusi IPU 2024 Dampak kecerdasan buatan terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Mr. P. Dalphond (Kanada) memoderatori bagian akhir debat ini.

Sebanyak 28 delegasi berpartisipasi dalam debat tersebut, yang menekankan perlunya kerangka hukum yang lebih kuat dan kerja sama internasional. Contoh-contoh spesifik negara menggambarkan perlunya reformasi menyeluruh untuk mencegah praktik-praktik tersebut dan mendukung para korban. Sesi tersebut diakhiri dengan seruan untuk tindakan kolektif guna melindungi hak-hak anak dan memastikan proses adopsi yang etis. Delegasi dari Indonesia, Jepang, Afrika Selatan, Turki, dan Uruguay melaporkan upaya legislatif untuk melindungi anak yatim dan mencegah perdagangan anak yatim, dan menyarankan pembuatan indikator untuk menarik perhatian parlemen terhadap fenomena tersebut.

Delegasi Indonesia menyampaikan intervensi tentang Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan untuk mengatur adopsi antarnegara, yaitu: pengesahan Konvensi Hak Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Anak; Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Penting untuk diingat bahwa kesejahteraan anak harus diutamakan dalam setiap adopsi, dan setiap anak berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Perlindungan, penghormatan, dan penghormatan hak-hak anak, khususnya mereka yang terlibat dalam adopsi antarnegara, merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara di dunia.

Pada sidang Komite ini, juga memilih anggota Biro dari kelompok geopolitik. Enam kandidat terpilih untuk mengisi kekosongan di Biro Komite dan lima anggota Biro yang menyelesaikan masa jabatan pertama mereka terpilih kembali untuk masa jabatan kedua.



Gambar 2.14 Selayang pandang Susana sidang IPU ke-150 di Tashkent, Uzbekistan.

C. PARTISIPASI DELEGASI DALAM PERTEMUAN BILATERAL

Selama Sidang Umum IPU ke-150, Delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa parlemen, antara lain:

1. PERTEMUAN BILATERAL DENGAN PARLEMEN ARMENIA

Pada sela-sela persidangan IPU ke-150, delegasi Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan delegasi parlemen Armenia pada tanggal 6 April 2025. Delegasi DPR RI diwakili oleh Ravindra Airlangga, sedangkan Parlemen Armenia diwakili oleh Hakob Arshakyan, Arsen Torosyan, Hasmik Hakobyan, dan Tsovinar Vardanyan. Pertemuan ini membahas terkait dengan peluang kerja sama Indonesia-Armenia di bidang kepemudaan termasuk pengembangan ekonomi digital, dan juga perdagangan bilateral. Armenia juga mengapresiasi dan terus mengajak Indonesia berperan aktif dalam proses perdamaian Armenia dan Azerbaijan. Indonesia menegaskan bahwa Indonesia memegang teguh prinsip penghormatan terhadap kedaulatan nasional, dan upaya perdamaian melalui diplomasi.

Gambar 3.0 Wakil Ketua BKSAP, Ravindra Airlangga dengan Wakil Ketua Parlemen Armenia, Hakob Arshakyan dalam pertemuan bilateral antara Indonesia-Armenia di sidang IPU ke-150



Terkait kerjasama di bidang investasi dan perdagangan, kedua parlemen sepakat untuk mendorong peningkatan perdagangan bilateral, melalui berbagai komoditas ekspor dan impor, termasuk salah satunya yaitu upaya untuk membangun industri halal. Di samping itu, juga dibahas upaya peningkatan kerjasama dalam bidang maritim dan perikanan. Sebagai salah satu negara tetangga yang saling berbatasan daerah laut, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk menghormati batas ZEE dan mendukung penuh kedaulatan satu sama lain, khususnya dalam konteks perbatasan maritim kedua negara.



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

2. PERTEMUAN BILATERAL DENGAN PARLEMEN MYANMAR (COMMITTEE REPRESENTING PYIDAUNGSU HLUTTAW / CRPH)

Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo bersama anggota BKSAP dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi, menghadiri pertemuan bilateral dengan Parlemen Myanmar di pengasingan (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw / CRPH), di sela-sela padatnya agenda sidang IPU yang ke-150. Pertemuan bilateral yang dilakukan dengan CRPH ini merupakan agenda rutin yang biasa dilakukan di sela-sela Sidang IPU diantara kedua pihak guna mendengarkan perkembangan terkini terkait situasi di Myanmar paska kudeta militer 1 Februari 2021.

Hadir mewakili CRPH Adalah Mr. Win Myat AYE (Ketua Delegasi), Mr. Htun THU (Staf Ahli), serta Ms. Mya THIDA. Pada pertemuan tersebut Delegasi Indonesia menyampaikan dukungan konsisten terhadap pentingnya implementasi segera 5 Point Consensus di Myanmar. Delegasi juga menyampaikan dukungan terhadap Rancangan Resolusi Emergency Item mengenai Myanmar yang akan diajukan oleh delegasi Thailand dan Filipina di Sidang Pleno.



Gambar 3.1 Wakil Ketua dan Anggota BKSAP, Bramantyo Suwondo dan Fathi, dalam pertemuan dengan perwakilan parlemen Myanmar dalam pengasingan di sela-sela sidang IPU ke-150

3. PERTEMUAN BILATERAL DENGAN PARLEMEN TURKIYE

Dalam pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen Turkiye, BKSAP DPR RI diwakili oleh Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera, bersama Wakil Ketua BKSAP, Muhammad Husein Fadulloh, Ravindra Airlangga, dan Bramantyo Suwondo sepakat untuk menggali potensi kerja sama khususnya pada sektor tekstil, otomotif, konstruksi, energi—termasuk minyak, gas, serta energi terbarukan—serta sektor pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan melalui program pertukaran pelajar, kegiatan budaya, dan promosi *halal tourism*. Selain itu, kedua negara juga memandang penting penguatan kerja sama di bidang pertahanan, keamanan, dan intelijen untuk menghadapi dinamika tantangan global,

Terkait proses aksesi Indonesia ke OECD, DPR RI menilai pengalaman Turkiye dalam melaksanakan standar dan rekomendasi OECD, khususnya di bidang perpajakan, investasi, dan kebijakan persaingan, merupakan rujukan penting. Indonesia sangat menghargai dukungan teknis, program *capacity building*, serta pendampingan diplomatik dari Turkiye guna memperkuat kerangka transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai standar internasional.

Dalam bidang kerja sama antarparlemen, Indonesia dan Turkiye telah menjalin hubungan erat melalui kunjungan resmi dan dialog terbuka, termasuk dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina di forum internasional seperti IPU, APA, dan PUIC. Kedua negara menegaskan kembali dukungan terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka, dan Indonesia secara resmi mengundang Turkiye untuk menghadiri Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta pada 12–15 Mei 2025. Kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperjuangkan keadilan, hak asasi manusia, dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.



Gambar 3.2 Peretmuhan Bilateral
antara delegasi BKSAP DPR RI dengan
Parlemen Republik Turkiye



4. PERTEMUAN BILATERAL DENGAN PARLEMEN SWEDIA

Pada pertemuan bilateral dengan Parlemen Swedia, terdapat empat kategori prioritas kerja sama, yakni kerja sama antar-parlemen, ekonomi, infrastruktur hijau dan transportasi, serta hubungan antar warga negara. BKSAP DPR RI diwakili oleh Wakil Ketua dan Anggotanya, Bramantyo Suwondo dan Fathi, juga menekankan penguatan hubungan dagang Indonesia dengan Swedia melalui percepatan negosiasi IEU-CEPA, untuk mewujudkan perdagangan internasional yang Non Diskriminatif, khususnya bagi Negara-negara di kawasan ASEAN.



Gambar 3.3 Delegasi BKSAP DPR RI dalam pertemuan bilateral dengan Parlemen Swedia di sela-sela sidang IPU ke-150

Wakil Ketua BKSAP sekaligus anggota grup kerja sama bilateral Indonesia-Swedia, Bramantyo Suwondo membuka pertemuan dengan apresiasi atas hubungan diplomatic dan kerja sama antara Indonesia dengan Swedia yang sudah berjalan selama 75 tahun yang saling menguntungkan di bidang perdagangan, investasi infrastruktur transportasi, dan pariwisata. Apresiasi juga diberikan atas terciptanya platform kuat yang telah dibangun antara parlemen dari kedua negara baik dalam kerangka bilateral maupun regional. Selain itu, Bramantyo juga megapresiasi parlemen Swedia yang telah menerima kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia-Swedia pada akhir Januari 2025 lalu.



Gambar 3.4 Delegasi BKSAP DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua dan Anggota BKSAP, Bramantyo Suwondo dan Fathi dalam pertemuan bilateral dengan Parlemen Swedia



5. PERTEMUAN BILATERAL DENGAN UKRAINA

Delegasi BKSAP DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua BKSAP, Muhammad Husein Fadulloh, Ravindra Airlangga, dan Bramantyo Suwondo melaksanakan pertemuan bilateral dengan Delegasi Parlemen Ukraina di sela-sela persidangan IPU ke-150 di Tashkent, Uzbekistan. Pertemuan ini menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten mendukung upaya perdamaian serta memihak pada nilai-nilai universal, khususnya kemanusiaan.

Gambar 3.5
Delegasi BKSAP DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Ukraina di sela-sela sidang IPU ke-150



Delegasi Indonesia juga menekankan bahwa meskipun Indonesia merupakan bagian dari BRICS, pendekatan diplomasi dengan setiap negara tetap menjadi prioritas penting. Hal ini dilakukan guna menjaga hubungan baik, memperkuat kerja sama, serta memastikan terbangunnya kepentingan yang selaras dengan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Delegasi Ukraina menyampaikan peluang kerja sama di bidang budaya dan keagamaan. Delegasi Ukraina menyampaikan keinginan untuk menjalin kolaborasi dengan Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbanyak. Ukraina sendiri memiliki komunitas Muslim yang cuku besar di Crimea dan merupakan warisan dari peradaban Islam dari abad ke 15 sampai 18.



Gambar 3.6 Delegasi BKSAP DPR RI yang diwakili oleh Wakil Ketua BKSAP, Ravindra Airlangga, M. Husein Fadlulloh dan Bramantyo Suwondo dalam pertemuan bilateral dengan Parlemen Ukraina

6. PERTEMUAN BILATERAL DENGAN INDIA

Ketua BKSAP Mardani Ali Sera beserta Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga melakukan pertemuan bilateral dengan Delegasi India antara lain, Mr. Hari Bansh Narayan Singh, Mr. Anurag Singh Thakur, Ms. Aparajita Sarangi, serta Mr. Bhartruhari Mahtab. Pertemuan bilateral yang dilakukan di sela-sela Sidang IPU yang ke-150 ini, mendiskusikan mengenai bagaimana kedua parlemen dapat mendorong peningkatan Kerjasama bilateral diantara kedua negara, khususnya dalam konteks kerja sama politik dan strategis dimana Indonesia dan India sama-sama anggota G20, ASEAN-India Dialogue Partner, dan Gerakan Non-Blok (GNB).

Pada kesempatan tersebut Ketua BKSAP juga menyampaikan pentingnya Kerja sama di forum multilateral seperti PBB, WTO, dan Indo-Pacific frameworks, serta

Fokus pada Indo-Pasifik yang bebas dan inklusif, sejalan dengan konsep ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).



Gambar 3.7 Penyerahan Cinderamata oleh Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera, kepada Wakil Ketua Rajya Sabha, Hari Bansh Narayan Singh, dalam pertemuan bilateral Indonesia - India pada sidang IPU ke-150

7. PERTEMUAN BILATERAL DENGAN OMAN

Dalam pertemuan bilateral antara Delegasi BKSAP DPR RI dengan Majelis Syura Kerajaan Oman, sepakat untuk memperkuat kerja sama bilateral. Kedua negara menekankan kesamaan nilai, terutama dalam mengedepankan Islam moderat dan toleran, serta visi bersama dalam mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan. Pertemuan ini diwakili oleh Wakil Ketua BKSAP, Muhammad Husein Fadulloh, Ravindra Airlangga, dan Bramantyo Suwondo.

Kedua parlemen juga berkomitment untuk terus menyuarakan dukungan bagi hak-hak rakyat Palestina di forum internasional, seperti IPU, APA, dan PUIC, serta menegaskan pentingnya pembentukan negara Palestina yang merdeka. Dalam kesempatan ini, Indonesia mengundang State Council of Oman untuk menghadiri Konferensi PUIC ke-19 di Jakarta pada 12–15 Mei 2025.

Kedua negara juga berkomitmen memperkuat kerja sama di sektor energi, termasuk minyak, gas, dan energi terbarukan, serta mendorong pengembangan komoditas utama seperti CPO. Selain itu, kerja sama pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan terus ditingkatkan, dengan Oman tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua dari kawasan Timur Tengah ke Indonesia. Potensi kerja sama halal tourism, pertukaran pelajar, serta program kota dan desa

kembar (sister city/sister village) juga diidentifikasi sebagai bidang yang strategis untuk mempererat hubungan kedua negara.



Gambar 3.8 Pertemuan Bilateral delegasi DPR RI dengan Parlemen Kesultanan Oman. Kedua parlemen juga berkomitment untuk terus menyuarakan dukungan bagi hak-hak rakyat Palestina di forum internasional, seperti IPU, APA, dan PUIC, serta menegaskan pentingnya pembentukan negara Palestina yang Merdeka.

8. PERTEMUAN BILATERAL DENGAN IRAN

Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi Gerindra, Muhammad Husein Fadlulloh, anggota BKSAP dari Fraksi NasDem, Andina Theresia Narang, dan anggota BKSAP dari Fraksi Golkar, Trinovi Khairani, melakukan pertemuan bilateral dengan Majles Shoraye Eslami Republik Islam Iran yang diwakili oleh Mr. Fada Hossein Maleki dan Ms. Somayeh Rafiei, pada sela-sela sidang IPU ke-150 yang diselenggarakan pada tanggal 5-9 April 2025 di Tashkent, Uzbekistan.

Pertemuan membahas mengenai isu Palestina dan dukungan terhadap emergency item terkait Gaza yang akan diajukan oleh negara-negara Arab di sidang pleno IPU ke-150. Kedua parlemen menyatakan dukungan terhadap emergency item tersebut. Di sisi lain, kedua parlemen juga membahas mengenai bagaimana parlemen dapat berperan aktif dalam mendorong peningkatan kerja sama bilateral diantara kedua negara serta menjadi jembatan komunikasi dan dialog antara Masyarakat kedua negara.



Gambar 3.9 Pertemuan Bilateral antara delegasi BKSAP DPR dengan Parlemen Republik Islam Iran. Pertemuan membahas mengenai isu Palestina dan dukungan terhadap emergency item terkait Gaza yang akan diajukan oleh negara-negara Arab di sidang pleno IPU ke-150.

III KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

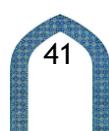
1. Pertemuan IPU ke-150 di Tashkent, Uzbekistan, berjalan lancar dan penuh dengan perdebatan dengan fokus terutama pada situasi konflik dan kemanusiaan di Gaza dan Myanmar.
2. Dalam persidangan dan perdebatan pada *Standing Committee on Peace and International Security*, forum berhasil menyepakati diadopsinya resolusi terkait “The role of parliaments in advancing a two-State solution in Palestine”.
3. Dalam persidangan dan perdebatan pada Standing Committee on Sustainable Development, forum berhasil menyetujui diadopsinya resolusi yang berjudul “*Parliamentary strategies to mitigate the long-lasting impact of conflicts, including armed conflicts, on sustainable development*”.
4. Debat *emergency item* menyajikan 3 usulan yang diputuskan melalui pengambilan suara, yakniL (1) *Advancing global economic cooperation: Reducing tariffs and combating protectionism*; (2) *Parliamentary diplomacy to promote peace and address the humanitarian crisis in Myanmar*; dan (3) *The need for urgent action on the recent violation of the ceasefire agreement by Israel in Palestine, the escalating conflicts in the Democratic Republic of Congo and Sudan, and the compounding effects of global warming*. Ketiga *emergency items* tidak dapat diadopsi karena gagal mendapatkan 2/3 dari suara mayoritas.
5. Debat *emergency item* terkait situasi Gaza gagal mengambil keputusan dikarenakan isu yang dicakup terlalu banyak, sehingga fokus isu yang dibahas tidak memiliki fondasi yang kuat.
6. Komite Eksekutif IPU akan bertemu kembali sekitar Juni 2025 di luar jadwal Assembly dengan Yunani sebagai lokasi penyelenggaraan.
7. Agenda persidangan pada pertemuan IPU ke-151 di Geneva, Swiss akan fokus pada isu terkait “*Recognizing and supporting the victims of illegal international adoption and taking measures to prevent this practice*” yang diusung oleh *Standing Committee on Democracy and Human Rights*.

B. SARAN

1. Mengingat bahwa Sidang IPU ke-150 merupakan sidang IPU pertama pada periode 2024-2029 dan pentingnya substansi yang dibahas, maka disarankan agar kedepannya dapat mengadap rapat persiapan delegasi untuk mensosialisasi aturan jalannya persidangan dan pengambilan keputusan dalam IPU.
2. DPR RI untuk dapat kembali memperjuangkan *emergency item* dan/atau draft resolusi terkait Gaza dan Myanmar di pertemuan IPU ke-151.



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.



41



3. Sekretariat BKSAP DPR RI untuk dapat menerjemahkan resolusi yang disepakati oleh IPU dan memastikan pendistribusianya ke komisi yang terkait.
4. BKSAP untuk dapat memastikan persiapan teknis dan substansi guna mematangkan agenda dan isu-isu yang akan dibahan untuk pertemuan IPU ke-151 berikutnya.
5. BKSAP perlu kembali merujuk pada Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dan kepentingan strategis RI dalam mengimplementasikan diplomasi parlemen, bahwa semua isu internasional sejatinya penting dan patut untuk diperjuangkan selagi isu tersebut sejalan dengan kepentingan nasional RI.

IV PENUTUP

A. UCAPAN TERIMA KASIH

Delegasi DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas Delegasi sehingga misi Delegasi di Sidang IPU ke-150 di Tashkent, Uzbekistan; termasuk dukungan substansi dan pendampingan selama persidangan. Delegasi DPR RI mengharapkan kerja sama ini akan semakin erat pada Sidang IPU selanjutnya.

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut:

- Tautan *List of Participants*
<https://www.ipu.org/file/21569/download>
- Tautan *Tashkent Declaration – Parliamentary action for social development*
<https://www.ipu.org/file/21429/download>
- Tautan Resolusi *The Role of Parliaments in advancing a two-state solution in Palestine*
<https://www.ipu.org/file/21431/download>
- Tautan Butir Wicara
<https://www.ipu.org/event/150th-ipu-assembly-and-related-meetings#event-sub-page-36292/>
- Tautan Hasil Sidang IPU ke-150
<https://www.ipu.org/file/21716/download>

C. ANGGARAN

Kegiatan partisipasi Delegasi DPR RI pada Sidang IPU ke-150 ini menggunakan anggaran APBN dari anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Dewan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.888.038.250 (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

D. KATA PENUTUP

Demikianlah Laporan Delegasi DPR RI menghadiri Sidang IPU ke-150 yang telah diselenggarakan secara fisik pada tanggal 5-9 April 2025 di Tashkent, Uzbekistan. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban Parlemen untuk terbuka dan transparan kepada publik.

Jakarta, 10 April 2025

Ketua Delegasi,



Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng.
A-447